

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, E. R. dan I. B. Riharjo. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(12): 1-17.
- Arifani. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 13(1):68–82.
- Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Bachrudin Musthafa, PhD; Akuntabilitas, Transparansi dan Produktivitas Kinerja, Ditulis untuk KOMUNITA.
- Baswir. 1999. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Baldric. 2017. Defenisi Pengawasam. *Jurnal Teori Pengawasan* 63.
- Bastia. 2017. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Damayanti, E. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(3): 1-21
- Daulay, E Kurnia, I Maulana. 2017. Lingkungan Aparatur Pemerintah, hlm. 218.
- Daulay, E Kurnia, I Maulana. 2017. Lingkungan Aparatur Pemerintah, hlm. 219.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.
- Hanifah, Hanim Nur, Nurul Hidayati, and Rita Mutiarni. 2019. “Pengaruh Produk Ramah Lingkungan/Green Product Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware.” *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 12(2).
- Hanafiah, Mahmud. M., Halim, Abdul. 2016. Analisis laporan Keuangan Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nababan, R. A., M. Sihombing., dan H. Tamrin. 2018. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep *Value For Money* pada Pemerintah di Kabupaten Dairi”. *Antropos: Jurnal Antropologo Sosial dan Budaya* 4(1):108-120.
- Mahayani, N. L. A. 2017. Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 12(2):129–144.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Andi.
- _____. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Bupati Flores Timur No. 34 Tahun 2017 Pasal 6 *Tugas Klinik Konsultasi Pengawasan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor .48 Tahun 2008 *Pendanaan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 Pasal 1 *pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 *Tranparansi Pengelolaan Keuangan*.
- Permendagri Nomor . 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PP71/2010 *batasan transparansi*.
- Putri, C. dan Budi Purnomo. 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan & Kinerja Karyawan berkonsep Value for Money. *Jurnal Riset Administrasi & Keuangan* 6(3).
- Riadi. 2020. Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan).
- Ryadi. 2017. Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Publik* 1(1).
- Sermini, & Andi Afrizal. 2019. Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas terhadap

pengelolaan keuangan daerah Kab. Roka Hulu. *Jurnal Ilmiah & Bisnis* 1(1):63-75.

Sari, A. K. & Trisnawati, R. 2021. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2(1):97-111.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 2007. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiee. 2019. Definisi Pengawasan. *Jurnal Teori Pengawasan* 167.

Trisnawati. 2019. Pengaruh Transparansi & Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Madsah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad* (14):1-19.

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*.

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*.

Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 *perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1959 *Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah*.

Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, Op.cit. 2018. Aspek Pengawasan Melekat Dalam *Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.